

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI PROVINSI MALUKU

JALIL RUMFOT

Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Pattimura

ABSTRACT

*This study aims to analyze the Management Strategy of Mirati Dewaningsih Tuasikal in the Implementation of the Functions of the Regional People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD-RI) in Ambon City. The data collection technique used was an in-depth interview with the help of an interview guide. Document tracing is carried out directly while **observing**, reading, understanding concepts, to obtain secondary data on work reports, statutory regulations, decrees, and brochures related to the problem at hand. The data from this study were analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of the study show that, Mirati Dewaningsih Tuasikal's Management Strategy in the Implementation of the RI DPD Functions in Ambon City which includes aspects of: a) planning (planing), b) organizing (organizing), c) implementation (actuating), and d) monitoring (controlling)) went well where it was able to meet public expectations.*

Keywords: management, strategy, DPD function

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Manajemen Strategi Mirati Dewaningsih Tuasikal Dalam Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Kota Ambon. Teknik pengumpulan data yang digunakan indepth interviu dengan bantuan panduan wawancara. Penelusuran dokumen dilakukan secara langsung sambil mengamati, membaca, memahami konsep, untuk memperoleh data sekunder padalaporan kerja, peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan brosur berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Manajemen Strategi Mirati Dewaningsih Tuasikal Dalam Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon yang mencakup aspek : a) perencanaan (planing), b) pengorganisasian (organizing), c) pelaksanaan (actuating), dan d) pengawasan (controlling) berjalan dengan baik dimana mampu memenuhi ekspetasi public.

Kata Kunci: manajemen, strategi, fungsi DPD

PENDAHULUAN

Secara faktual, kelahiran DPD baru terjadi pada 1 Oktober 2004, yang

ditandai pelantikan dan pengambilan

sumpah/janji para anggota Dewan

Perwakilan Daerah sebagai hasil

Pemilu 5 April 2004. (Budiardjo, 2008 : 348-349). Pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu: Pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR diganti dengan keberadaan DPD. Kedua, karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. (Mahfud MD, 2010 : 68).

DPD RI merupakan perwujudan sistem perwakilan teritorial dan DPR RI sebagai perwakilan politik. Untuk mengoptimalkan sistem tersebut pemerintah terus berupaya melakukan reformasi dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Peran Pemerintah Daerah yang sebelumnya kurang diberdayakan, didorong untuk dapat berpartisipasi demi mengakomodir kepentingan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. (Teguh, 2019 : 1).

DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum tahun 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. (Assyidiqie, 2006 : 39). Sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik, sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah, sedangkan sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. (Purnomowat, 2005 : 102). Begitupun DPD RI yang diketahui juga sebagai lembaga perwakilan baru produk amendemen atau tepatnya pada perubahan ketiga atas UUD NRI 1945 yang dihasilkan melalui Pemilu 2004, antara lain adalah DPD RI. (Legowo, dkk, 2005 : 132).

Kelahiran DPD RI telah membangkitkan optimisme

di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional sampai melahirkan solusi pembangunan di daerah yang konkrit. Untuk memenuhi harapan daerah yang besar tersebut, DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. *Pertama*, fungsi legislasi yaitu, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahas RUU terkait otonomi daerah. *Kedua*, fungsi pertimbangan dengan memberikan pertimbangan kepada DPR. *Ketiga*, fungsi pengawasan yaitu, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk

ditindaklanjuti. (Soemantri, 2014 : 228).

Terlepas dari itu, DPD memiliki wewenang, tugas dan fungsi. Hal ini sebagaimana penegasan Pasal 249 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ayat 1 huruf a-d DPD. Disamping itu, DPD juga memiliki fungsi. Hal ini sebagaimana penegasan Pasal 248 Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ayat 1 huruf a-d DPD.

Relevan dengan fungsi anggota DPD RI tersebut, maka

Mirati Dewaningsih Tuasikal, yang merupakan anggota DPD RI asal Maluku juga mengupayakan fungsi yang berkaitan dengan masalah-masalah di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon, antara lain : a) ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; b) pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;

Dari hasil observasi langsung (*direct observation*) ternyata implementasi fungsi DPD RI oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal di Kota Ambon belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan : a) dalam implementasi fungsi DPD, yang relevan dengan ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga belum dilaksanakan dengan maksimal. b) Begitu pun dalam implementasi fungsi DPD, yang berkaitan dengan pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja

negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama juga belum dilaksanakan dengan baik.

Dalam konteks implementasi fungsi DPD yang diperankan Mirati Dewaningsih Tuasikal tersebut juga diperhadapkan dengan Manajemen Strateginya Dalam Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon. Manajemen strategi itu menyangkut dengan : a) perencanaan (*planning*), b) pengorganisasian (*organizing*), c) pelaksanaan (*actuating*), d) pengawasan (*controlling*). Dari latar belakang masalah dan fenomena-fenomena diatas, menarik perhatian penulis untuk menggali makna sebenarnya dibalik fenomena-fenomena tersebut, dengan rumusan masalah adalah : Bagaimana Manajemen Strategi Mirati Dewaningsi Tuasikal Dalam

Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon.

TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis Manajemen Strategi Mirati Dewaningsih Tuasikal Dalam Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon. Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara akademik dan praktis. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik pada umumnya, dan khususnya Manajemen Strategi Mirati Dewaningsih Tuasikal Dalam Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi Mirati Dewaningsih Tuasikal yang berkaitan dengan manajemen strateginya

selaku anggota DPD RI di Kota Ambon.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratogos* atau *strategi* yang berarti jenderal. Strategi berarti seni para jenderal. Jika diartikan dari sudut militer, strategi adalah cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. (Abdurahman, 2015:179).

Menurut Handoko (2015:86) strategi adalah program untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi dapat juga didefenisikan sebagai pola tanggapan organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Defenisi ini mengandung arti bahwa, setiap organisasi selalu mempunyai

strategi walaupun tidak pernah secara eksplisit dirumuskan. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar perusahaan. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya-sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Senada dengan itu, Akdon (2006:5) mengatakan bahwa, strategi dalam manajemen organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan Kusdi (2013:87) mengatakan bahwa, pengertian strategi dalam konteks organisasi

adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, strategi adalah program untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dengan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar, yang dilakukan melalui cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dan terencana dengan pengalokasian berbagai sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

Manajemen Strategi

Menurut Siagian (2012:15) bahwa, manajemen stratejik adalah

serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Senada dengan itu, Nilasari (2014:5) mengatakan bahwa, manajemen strategi merupakan proses sistematis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebuah proses manajemen strategi melibatkan keseluruhan kepentingan yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, serta komitmen juga dilibatkan berdasarkan proses manajemen strategi. Sebuah keputusan yang diambil berdasarkan proses manajemen strategi diharapkan

merupakan keputusan yang tepat dan tidak asal-asalan.

Sedangkan menurut Abdurahman (2015:200) bahwa, manajemen strategi menekankan pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Manajemen strategi mencari cara untuk mengelola semua sumber daya guna untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan membantu menciptakan kesuksesan pada masa yang akan datang. Manajemen strategi merupakan suatu seni dan ilmu dalam perumusan (*formulating*), pelaksanaan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) tentang keputusan-keputusan strategi antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak, yang dilakukan secara sistimatis dan terencana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang mengkondisikan organisasi pada posisi yang dipastikan, untuk mencapai tujuan organisasi.

Fungsi-Fungsi Manajemen

Dalam manajemen terdapat sejumlah fungsi-fungsi operasional. Fungsi-fungsi tersebut telah dikemukakan para penulis dengan berbagai sudut pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Dalam pemikiran Terry sebagaimana di kutip Winardi (1986:163) bahwa, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang

berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Ia mengemukakan fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni : *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).

Sedangkan menurut Westra (1980 : 10) terdiri dari ; *forecasting, planning* termasuk *budgeting, organizing, staffing* atau *assembling resources, directing* atau *commanding, leading, coordinating, motivating, controlling, reporting*. Senada dengan itu Hasibuan (2012:3) mengetengahkan berbagai fungsi manajemen menurut para ahli. Menurut Mee (1952:20) ialah *planning, organizing, motivating, dan controlling*. Selain itu menurut Allen

ialah leading, planning, organizing, controlling. dan menurut MC. Namara ialah planning, programming, budgeting, dan system.

Pada sisi lain Prihantoro (2012:22) menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan) dan Controlling (Pengendalian) yang kemudian dikenal dengan istilah POAC. Pendapat para ahli lainnya yang menjelaskan mengenai berbagai fungsi-fungsi manajemen yang dapat dilihat dari sudut prosesnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa, fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (planning, organizing, actuating dan controlling). yang

bertujuan untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Kota Ambon. Informan kunci penelitian ini ditentukan secara purposive, meliputi anggota DPR RI 4 orang, Akademisi 3 orang, Tokoh Masyarakat 3 orang, tokoh pemuda 5 orang, dan pengurus partai politik 5 orang. Karena itu, informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

Untuk menghimpun data primer digunakan teknik *Indepth Interview*, dengan bantuan *Indepth Guide*, dimana pertanyaan dan jawaban bersifat langsung dan lisan, ditulis informan dalam bentuk transkrip lengkap sebagai dokumen penelitian lapangan. Selain itu, digunakan teknik dokumentasi

dengan cara berusaha menelusuri, membaca dan memahami konsep, data sekunder secara langsung pada dokumen, laporan kerja, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, surat keputusan, dan brosur berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, menurut Miles dan Huberman, 1992), diadaptasi oleh Sukardi (2009: 124), yakni pertama melakukan kegiatan reduksi data, kedua penyajian data, ketiga penarikan kesimpulan/verifikasi.

ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Manajemen Strategi Mirati Dewaningsih Tuasikal Dalam Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon

Guna mengetahui Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Partai Manajemen Strategi Mirati Dewaningsi Tuasikal Dalam

Pelaksanaan Fungsi DPD RI di Kota Ambon, data direkam dari hasil wawancara dengan informan melalui empat dimensi dan sub-subnya, serta analisisnya, dapat dilihat sebagai berikut.

Perencanaan (*planning*)

Manusia sebagai unsur vital pelaksana organisasi (lembaga/institusi) public khususnya DPD RI dalam pelaksanaan fungsinya selalu diawali dengan perencanaan (*planning*). Sebab perencanaan merupakan unsur terpenting dan fundamental dari organisasi, karena *actuating dan controlling* harus terlebih dahulu direncanakan. (Siagian, 2012 : 36). Aspek perencanaan (*planning*), berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon itu selalu menjadi perhatian serius anggota DPD RI di maksud, seperti dikemukakan

anggota DPD RI : Letjen TNI Mar Purn Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Novita Anakotta, SH,.MH, Anna Latuconsina, S.H. dan Mirati Dewaningsih Tuasikal,ST (November, 2022) : *“Aspek perencanaan (planning) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD RI dilaksanakan oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan realisasi fungsi DPD RI di Kota Ambon berjalan sesuai perencanaan yang didesain sejak awal.”*

Para senator sebagai pelaksana organisasi public (DPD RI), yang memperjuangkan kepentingan orang banyak tersebut, diharapkan memiliki perencanaan (*planning*) yang komprehensif, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi lembaga utusan daerah tersebut, seperti di kemukakan para

akademisi Dr. Amir Faisal Kotarumalos, S.Sos, M.Si, Dr. Sfaruddin B. Layn, S.Sos, M.Si, Dr. Saiful Rijal Mahulauw, S.Sos, M.Si (November, 2022) : *“Sisi perencanaan (planning) yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD RI dilaksanakan oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal di Kota Ambon dengan konsisten. Sehingga berbagai pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon berjalan sukses.”*

Ada ekspetasi public di Kota Ambon agar pelaksanaan fungsi DPD oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal berjalan sukses. Hal ini tidak terlepas dari upaya anggota DPD tersebut mengawalinya fungsi kelembagaannya dengan melakukan perencanaan (*planning*) yang sistimatis, seperti dikemukakan Tokoh Masyarakat : M. Thamrin Baman, Ajid Tomagola, S.Sos,

Hijrah Hatapayo, S.Pd, dan Jan Sariwating (November 2022) : *“Harapan public di Kota Ambon terpenuhi dengan baik, dimana Ibu Mirati Dewaningsih Tuasikal selaku anggota DPD RI sukses merealisasikan fungsi DPD. Hal ini tidak terlepas dari sisi perencanaan (planning), yang didesain secara sistematis dan komprehensif.”*

Pengorganisasian (*organizing*)

Aspek penting berikutnya dari individu selaku pelaksana organisasi (lembaga/institusi) public khususnya DPD RI dalam pelaksanaan fungsinya yakni pengorganisasian (*organizing*). Peralnya sisi pengorganisasian (*organizing*) yang terkait dengan realisasi fungsi DPD RI tersebut merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja

manajerial, teknis dan lain sebagainya. (Suprihanto, Juliatriasa, 1998 : 14). Aspek pengorganisasian (*organizing*) itu menjadi perhatian serius Mirati Dewaningsih Tuasikal dalam realisasi fungsi DPD RI di Kota Ambon, seperti dikemukakan anggota DPD RI : Letjen TNI Mar Purn Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Novita Anakotta, SH,.MH, Anna Latuconsina, S.H. dan Mirati Dewaningsih Tuasikal,ST (November, 2022) : *“Dalam pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon aspek pengorganisasian (*organizing*) sangat diperhatikan oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal, dengan melibatkan banyak orang, dimana mereka bersinergi dalam mengoptimalkan realisasi fungsi DPD RI tersebut.”*

Relevan dengan pengorganisasian (*organizing*) selalu

menghendaki adanya kerjasama (*cooperation*) diantara elemen-elemen dalam organisasi public, baik itu dari level pimpinan, staf sampai dengan anggota. Kondisi serupa tentu diperhatikan anggota DPD RI di Kota Ambon, seperti dikemukakan pengurus partai politik : Risman Laduheru, S.IP, Riduan Hasan, SH, Sirhan Sirsabat, S.Sos, Fachrul Elly, ST, dan Rony Marasabessy, S.IP (November, 2022) : *“Mirati Dewaningsih Tuasikal dalam pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon selalu memperhatikan elemen pengorganisasian (*organizing*) dengan baik. Berbagai stakeholder terkait, baik itu secara internal dan eksternal dilibatkan, dimana mereka bersama-sama memaksimalkan fungsi lembaga senator itu di Kota Ambon.”*

Individu sebagai pelaksana dari organisasi public seperti DPD RI pada daerah asalnya, memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya dalam rangka merealisasikan fungsinya tersebut. Hal ini merupakan bagian dari pengorganisasian (*organizing*). Oleh karena itu, sisi pengorganisasian (*organizing*) diparhentikan dengan baik oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal di Kota Ambon, seperti dikemukakan Tokoh Pemuda : Subhan Patimahu, S.Pi, Ahmad Bilal Tuhulele, S.Sos, M. Faisal Sahitua, Faisal Hayoto, dan Eltin Tanalepy (November, 2022) : *“Berbagai sumber daya (*resources*) secara optimal diupayakan oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal dalam rangka merealisasikan fungsi DPD RI di Kota Ambon. Aspek sumber daya*

merupakan bagian dari sisi pengorganisasian (*organizing*).”

Pelaksanaan (*actuating*)

Sisi terpenting vital selanjutnya dari manusia (*human*) selaku pelaksana organisasi (lembaga/institusi) public khususnya DPD RI dalam realisasi fungsinya yakni, pelaksanaan (*actuating*), dimana anggota DPD RI dalam realisasi fungsinya harus memperhatikan aspek ini. Hal ini akan bermuara pada kerjasama diantara elemen-elemen internal dan eksternal. Sisi dimaksud juga diperhatikan Mirati Dewaningsih Tuasikal di Kota Ambon, seperti dikemukakan anggota DPD RI : Letjen TNI Mar Purn Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Novita Anakotta, SH,.MH, Anna Latuconsina, S.H. dan Mirati Dewaningsih Tuasikal,ST

(November, 2022) : “Aspek pelaksanaan (*actuating*) selalu diperhatikan dengan baik oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal, yang berkaitan dengan realisasi fungsi DPD RI di Kota Ambon. Hal ini dilakukannya dengan memberikan motivasi (*motivating*), mengarahkan (*directring*), mempengaruhi (*influencing*) dan memberi perintah (*commanding*).”

Aspek pelaksanaan (*actuating*) merupakan suatu keharusan dalam organisasi (lembaga/institusi) public seperti DPD RI. Hal ini menunjukkan suatu manajemen organisasi public yang baik. Dalam kontek itu, maka aspek pelaksanaan (*actuating*) selalu menjadi perhatian serius Mirati Dewaningsih Tuasikal, yang relevan dengan pelaksanaan fungsi DPR RI di Kota Ambon, seperti dikemukakan

para akademisi Dr. Amir Faisal Kotarumalos, S.Sos, M.Si, Dr. Sfaruddin B. Layn, S.Sos, M.Si, dan Dr. Saiful Rijal Mahulauw, S.Sos, M.Si (November, 2022) : “Aspek pelaksanaan (*actuating*) senantiasa menjadi perhatian serius Mirati Dewaningsih Tuasikal, yang relevan dengan pelaksanaan fungsi DPR RI di Kota Ambon. Pasalnya mampu menopang suksesnya realisasi fungsi DPD RI di Kota Ambon.”

Dalam pelaksanaan (*actuating*) yang relevan dengan pelaksanaan fungsi DPR RI di Kota Ambon oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal, tentu sangat tergantung sisi kepemimpinannya. Sebab dengan kepemimpinan yang baik akan mampu mensupport suksesnya aspek pelaksanaan (*actuating*). , seperti dikemukakan pengurus partai politik: Risman Laduheru, S.IP, Riduan

Hasan, SH, Sirhan Sirsabat, S.Sos, Fachrul Elly, ST, dan Rony Marasabessy, S.IP (November, 2022) : “Aspek kepemimpinan merupakan aspek paling determinen dari pelaksanaan (*actuating*), yang relevan dengan pelaksanaan fungsi DPR RI di Kota. Hal ini diperhatikan dengan baik oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal.”

Pengawasan (*controlling*)

Indikator berhasil tidaknya individu sebagai pelaksana dari suatu organisasi publik seperti DPD RI, yang berakitan dengan pelaksanaan fungsinya di daerah yakni, aspek pengawasan (*controlling*). Dengan pengawasan (*controlling*) akan bisa di ukur keberhasilan dan penyimpangan yang terjadi. Hal ini bermanfaat untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta mempertahankan keberhasilan.

Situasi seperti ini juga dilakukan Mirati Dewaningsih Tuasikal, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon, seperti dikemukakan anggota DPD RI : Letjen TNI Mar Purn Dr. Nono Sampono, S.Pi., M.Si. Novita Anakotta, SH,.MH, Anna Latuconsina, S.H. dan Mirati Dewaningsih Tuasikal,ST (November, 2022) : *“Aspek aspek pengawasan (controlling) selalu menjadi perhatian Mirati Dewaningsih Tuasikal, dimana sangat membantunya dalam suksesnya pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon.”*

Aspek pengawasan (*controlling*) selalu diperhatikan individu selaku pelaksana dari organisasi public. Hal ini berguna sebagai suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan. Dalam

pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal aspek ini selalu diperhatikannya baik itu secara internal kelembagaan dan eksternal kelembagaan, seperti dikemukakan Tokoh Pemuda : Subhan Patimahu, S.Pi, Ahmad Bilal Tuhulele, S.Sos, M. Faisal Sahitua, Faisal Hayoto, dan Eltin Tanalepy (November, 2022) : *“Sisi pengawasan (controlling) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPD RI oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal di Kota Ambon senantiasa diperhatikan dengan baik, dengan melibatkan internal kelembagaan dan eksternal kelembagaan.”*

Optimalisasi fungsi DPD RI di daerah dapat berhasil dengan baik, jika para anggota DPD RI dapat secara konsisten dan professional memperhatikan aspek pengawasan (*controlling*). Sebab aspek

pengawasan (*controlling*) menjadi indikator untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan yang perlu diperbaiki. Sisi optimalisasi fungsi DPD RI di Kota Ambon selalu diperhatikan dengan serius oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal, seperti dikemukakan pengurus partai politik: Risman Laduheru, S.IP, Riduan Hasan, SH, Sirhan Sirsabat, S.Sos, Fachrul Elly, ST, dan Rony Marasabessy, S.IP (November, 2022): “*Optimalisasi fungsi DPD RI di Kota Ambon selalu diperhatikan dengan serius oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal. Hal ini dilakukannya dengan memaksimalkan aspek pengawasan (controlling).*”

PENUTUP

Dari hasil analisis diatas, dibuat kesimpulan khusus, **pertama** dari aspek perencanaan (*planing*) yang berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi DPD RI di Kota Ambon oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal dapat dilaksanakan dengan baik, dimana mampu memenuhi ekspektasi public, **kedua** dari aspek pengorganisasian (*organizing*), yang relevan pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal dapat dilaksanakan dengan baik, dimana mampu memenuhi harapan public, **ketiga** dari aspek pelaksanaan (*actuating*), yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal dapat dilaksanakan dengan baik, dimana mampu memenuhi ekspektasi public, **ketiga** pengawasan (*controlling*) yang relevan pelaksanaan fungsi DPD RI di Kota Ambon oleh Mirati Dewaningsih Tuasikal dapat dilaksanakan dengan baik, dimana mampu memenuhi aspirasi public.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Herdiana Nana. 2015. *Manajemen Strategi Pemasaran*, Bandung, Pustaka Setia
- Akdon. 2006. *Strategic Manajemen for Educational Management*, Bandung, Alfabeta
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia. Pustaka Utama
- Hasibuan, Malayu S.P, 2012. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama*. Bandung: Pustaka Setia,
- Jimly Asshiddiqie, Jimly. 1999. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, cet Ke-1, Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer
- Kusdi. 2013. *Teori organisasi dan Administrasi*, Jakarta, Salemba Humanika
- Legowo, T.A. 2005. *dkk, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia
- Mahfud MD, 2010. *Pendapatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers
- Mee, F. Jhon. 1952. *Departement of Management*
- Nilasari, Senja. 2014. *Manajemen Strategi Itu Gampang*, Jakarta, Dunia Cerdas
- Prihantoro, Agung 2012, *Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen (Studi Kasus Madrasah Di Lingkungan Yayasan Salafiyah, Kijen Margoyoso, Pati)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah
- Purnomowati, Reni Dwi. 2005. *Implementasi Sistem Parlemen Bikameral dalam Parlemen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang, P. 2012. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya
- Suprihanto Jhon, Juliatriasa Djati. 1998. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Yigyakarta, BPF
- Terry, George, R dalam Winardi. 1986. *Asaz-Asaz Manajemen*, Bandung, Alumni
- Teguh, Muhammad Tajam. 2019. *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Terhadap Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam*, Skripsi, Progran Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
- Westra, Pariata. 1980. *Aneka Sari Ilmu Administrasi Pengantar Ilmu Administrasi*, Jakarta,

Balai Administrasi Akademi
Administrasi Negara